



Wali Kota Bantah Terima Fee dan Intervensi

■ Sidang Lanjutan Kasus Dugaan Suap Proyek SAH Supomo



Saya kan di sini sejak dari wakil wali kota, tentu dalam hal ini teman saya banyak dan ada yang meminta pekerjaan kepada kami. Tapi dengan adanya TP4D kan secara subjektif tidak bisa langsung memenangkan perusahaan tertentu, tapi tetap ikuti aturan yang ada.

HARYADI SUYUTI
Wali Kota Yogya

YOGYA, TRIBUN - Sidang lanjutan kasus dugaan suap rehabilitasi Saluran Air Hujan (SAH) Supomo Cs dengan terdakwa mantan jaksa fungsional Kejari Yogyakarta, Eka Safitra dan mantan jaksa fungsional Kejari Surakarta, Satriawan Sulaksono kembali digelar di Pengadilan Tipikor dan Hubungan Industrial, Rabu (26/2). Yang menarik, dalam persidangan ini Wali Kota Yogya, Haryadi Suyuti memberikan kesaksiannya dalam persidangan tersebut.

Dalam persidangan yang dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim, Asep Permana ini Wali Kota Yogyakarta, Haryadi Suyuti membantah sejumlah pernyataan yang menyebut dirinya melakukan intervensi serta menerima sejumlah uang dalam pembangunan proyek fisik di wilayah setempat.

Hal itu dikemukakannya dalam sidang yang juga menghadirkan dua saksi lain yakni mantan Ketua DPRD Kota Yogyakarta 2014-2019, Sujanarko dan mantan Ketua Komisi C DPRD Kota Yogyakarta 2014-2019, Christiana Agustiani.

Dalam kesaksiannya, Haryadi menyebut, dirinya hanya meminta agar lembaga Unit Layanan Pengadaan (ULP) membuat persyaratan kepada pemenang lelang proyek. Salah satunya, agar bersedia untuk memiliki NPWP di wilayah setempat.



TRIBUN JOGJA/RIKAS SAKRI
BERIKAN KESAKSIAN - Wali Kota Yogyakarta, Haryadi Suyuti memberikan kesaksian saat sidang lanjutan kasus dugaan suap proyek SAH Supomo di Pengadilan Tipikor dan Hubungan Industrial, Rabu (26/2). Dua saksi lain yang dihadirkan Christiana Agustiani, mantan Ketua Komisi C DPRD Kota Yogyakarta periode 2014-2019 dan Sujanarko, mantan Ketua DPRD Kota Yogyakarta periode 2014-2019.

Wali Kota

● Sambungan Hal 9

"itu yang saya minta, apakah itu bentuk intervensi atau bagaimana," katanya.

Lelang pada proyek SAH Supomo C sebelumnya menyisakan tiga peserta lelang yang memenuhi syarat yakni PT. Widoro Kandang, PT. Paku Bumi hingga akhirnya Pemkot menetapkan PT. Widoro Kandang sebagai pemenang lelang. Haryadi dalam kesaksiannya juga mengatakan tidak tahu menahu dengan sejumlah perusahaan tersebut.

Namun demikian, dirinya mengakui bahwa pernah bertemu dengan anggota Pokja lelang proyek rehabilitasi SAH Supomo, Baskoro Arwihawo tiga hari setelah operasi tangkap tangan oleh KPK, Agustus 2019 silam. Namun, ia mengatakan pertemuan yang berlangsung di rumah pribadinya itu, hanya meminta penjelasan dari Baskoro serta mencoba memberi arahan serta semangat pasca kejadian tersebut.

Haryadi mengakui, bahwa sebagai pejabat publik dirinya kerap diminta sejumlah kerabat untuk memberi pekerjaan baik yang bersifat kecil, menengah maupun besar. Namun, ia menyatakan dirinya tetap menekankan kepada stakeholder terkait untuk mengikuti prosedur yang benar dalam setiap pelaksanaan proyek.

"Saya kan disini sejak dan wakil wali kota, tentu dalam

BERSAKSI

- Wali Kota Yogyakarta, Haryadi Suyuti membantah intervensi dan terima fee proyek SAH Supomo di Pengadilan Tipikor dan Hubungan Industrial, Rabu (26/2).
- Dua saksi lain yakni mantan Ketua DPRD Kota Yogyakarta 2014-2019, Sujanarko dan mantan Ketua Komisi C DPRD Kota Yogyakarta 2014-2019, Christiana Agustiani.
- Mantan Ketua Komisi C DPRD Kota Yogyakarta, Christiana Agustiani mengakui pernah menerima dana tali kasih berupa uang senilai Rp40 juta.
- Uang itu diterima dari Kabid Binamarga DPUPKP Kota Yogyakarta, Umi Akhsanti pada pertengahan 2019 lalu.
- Uang itu dibagi ke Wakil Ketua Komisi C Rp6 juta dan anggota sisanya yang berjumlah 7 orang lain mendapat senilai Rp4 juta.
- Salah satu anggota komisi C tidak mau menerima uang tersebut.
- Ana menerima Rp8 juta dan telah mengembalikan ke KPK.

hal ini teman saya banyak dan ada yang meminta pekerjaan kepada kami. Tapi dengan adanya TP4D kan secara subjektif tidak bisa langsung memenangkan perusahaan tertentu, tapi tetap ikuti aturan yang ada," imbuhnya.

Soal pengumpulan dana dari sejumlah proyek, Haryadi yang pada sidang sebelumnya sempat disebut-sebut oleh para saksi menerima uang dari sejumlah proyek membantah telah pernah ataupun menerima dana tersebut.

"Ternasuk juga pengakuan para saksi sebelumnya yang menyebut keterlibatan istri saya, itu tidak ada. Sudah saya tanyakan langsung

Namun, ia tidak berusaha memperjelas tujuan pemberian serta asal muasal dana tersebut.

"Saya juga tidak terlalu berfikir saat itu. Antara lain karena belum pernah jadi tidak begitu tanya. Begitu tahu alasannya dana tali kasih, ya sudah saya terima," imbuh dia.

Ana kemudian membagikan uang tersebut kepada beberapa anggota komisi C lainnya. Dia bersama Bambang Seno, Wakil Ketua Komisi C saat itu mendapat masing-masing Rp6 juta dan anggota sisanya yang berjumlah 7 orang lain mendapat senilai Rp4 juta.

"Saya bagian lewat salah satu teman yakni pak War-to. Saya bagian langsung hanya dua orang selebihnya dia," imbuh Ana.

Salah seorang anggota komisi C, Ujar Ana, tidak mau menerima uang tersebut. Kemudian, Ana mengambil Rp2 juta dan membagikan sisanya kepada Bambang Seno. "Total saya terima Rp8 juta dan telah saya kembalikan lagi ke KPK," kata dia.

Soal proyek rehabilitasi SAH Supomo yang menjadi tupois utamanya baik perihal pengawasan maupun penganggaran, Ana mengaku sama sekali tidak tahu.

Uang tunai itu merupakan titipan dari Kepala DPUPKP Kota Yogyakarta, Agus Tri Haryono yang diberikan kepada Umi untuk diserahkan saat rapat kerja dengan dinas tersebut.

Ana menyatakan sempat menanyakan perihal status uang itu kepada Umi

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Inspektorat	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. Dinas PUPKP			

Yogyakarta, 25 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005